



KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

Anggun Aprinasari F¹ dan Asnawi Manaf²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : anggun_fultanegara@yahoo.com

Abstrak

Fenomena kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang seolah-olah menjadi momok yang susah untuk dicari solusinya. Fenomena ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, salah satunya Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan sebesar 16,56% yang masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional 13,33% (BPS, 2010). Upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat melalui pengokohan kelembagaan. Akan tetapi, kinerja dari lembaga tersebut bervariasi ada yang berhasil dan ada yang kurang berhasil dalam menjalankan kegiatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kapasitas kelembagaan dalam kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat. Penelitian ini mencoba mengkomparasikan dua BKM, yaitu BKM Sejahtera Mandiri Kabupaten Kendal dan BKM Podosugih Kota Pekalongan. Kapasitas kelembagaan diukur dengan dari tiga indikator, yakni aspek individu, kelompok, dan lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif serta menggunakan teknik analisis skoring dan pengumpulan data kuesioner. Dari hasil analisis skoring menunjukkan menunjukkan kapasitas BKM Podosugih dengan skoring 945 pada kelas I yaitu sangat baik, sedangkan BKM Sejahtera Mandiri dengan skoring 897 pada kelas II yaitu baik dalam menjalankan kegiatan. Dengan melihat kapasitas kelembagaan Idi Kelurahan Kebondalem dan Podosugih, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar dapat berlangsung efektif dalam upaya penataan kawasan lingkungan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Kelembagaan, Kapasitas Kelembagaan, Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat

Abstract

The phenomenon of poverty is a complex phenomenon that seems to be the scourge that is difficult to find a solution. This phenomenon is of particular concern for the government, one of Central Java province with a poverty rate of 16.56%, which is still above the national poverty rate of 13.33% (BPS, 2010). Government's efforts to accelerate poverty reduction is one of them Community Based Neighbourhood Development through institutional strengthening. However, the performance of these institutions varied which became successful and less successful in running that program. The purpose of this study is to assess the institutional capacity in the Community Based Neighbourhood Development. This study tried to compare the two BKM, namely BKM Mandiri Sejahtera Kendal Region and BKM Podosugih Pekalongan City. Institutional capacity is measured by three indicators, namely the aspects of individuals, groups, and institutions. This study uses descriptive and quantitative analysis using scoring techniques and data collection questionnaire. From the results of the analysis showed Podosugih with scoring 945 in first class is very good, while the BKM Sejahtera Mandiri with scoring 897 in the second grade both in running that program. By looking at the institutional in Kebondalem and Podosugih Region, required strengthening of local institutional capacity in order to be effective in the effort to organize the neighbourhood area.

Keywords: Poverty, Institution, Institutional Capacity, Community-Based Neighbourhood Development

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan merupakan fenomena kompleks yang seolah-olah menjadi momok yang susah untuk dicari solusinya. Permasalahan kemiskinan bersifat multidimensi yang berarti bukan hanya dari segi pendapatan saja, melainkan juga segi sosial. Hal ini sependapat dengan pernyataan Sen (1976) dalam Bourguignon (2003:26) yang mengungkapkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam yaitu segi ekonomi (segi pendapatan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (pangan) dan sosial (akses ke pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan hubungan sosial yang baik). Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden mengeluarkan Perpres No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang salah satu programnya adalah PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas).

Program PLPBK telah berjalan sejak tahun 2008 di Indonesia dan salah satu wilayah sarannya adalah Provinsi Jawa Tengah. Fenomena kemiskinan di Jawa Tengah menjadi perhatian khusus pemerintah ditinjau dari tingkat tingkat kemiskinannya sebesar 16,56% yang masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional yang telah ditetapkan yakni 13,33% (BPS, 2010). Selain itu, penurunan angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir 2007-2011 mengalami stagnasi, yaitu penurunannya hanya berkisar 1,2% per tahun (SUSENAS, 2011). Melalui program ini dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

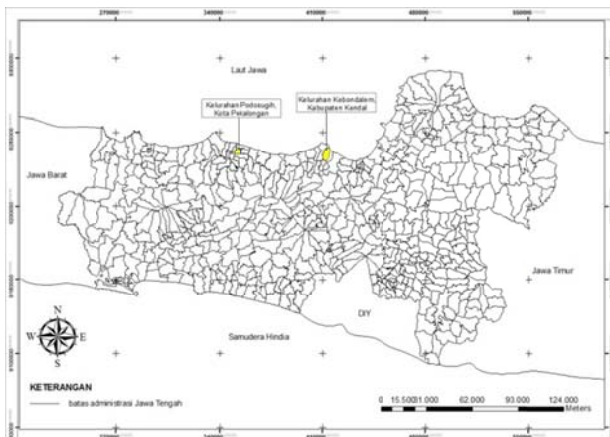
Sejak tahun 2008 hingga 2011, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terdapat 157 BKM yang mewakili desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan program PLPBK. Manfaat yang dapat dirasakan langsung adalah dengan adanya dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebesar 1 Milyar yang diberikan melalui BKM setempat sebagai modal dalam penataan kawasan lingkungan permukiman di kelurahannya. Akan tetapi, masih terdapat BKM yang memiliki

keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut (TNP2K dalam Depkominfo, 2011).

Kelembagaan dalam program ini cukup bervariasi. Kinerja lembaga yang bervariasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pemanfaatan dana BLM yang masing-masing BKM memiliki kapasitas dalam penyerapan dana yang berbeda-beda, kinerja dalam implementasi terhadap permasalahan penataan lingkungan, keterbatasan kapasitas kelembagaan pada aspek individu, kelompok, dan lembaga (Satker PBL Provinsi Jawa Tengah). Isu mengenai kelembagaan dalam program PLPBK ini yakni tidak semua BKM telah siap dan memiliki kemampuan dalam perwujudan visi program PLPBK secara efektif untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat (TNP2K dalam Depkominfo, 2011). Masih terdapat BKM yang memiliki keterbatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana, masih minimnya kemampuan dalam mengidentifikasi potensi masalah wilayahnya, merencanakan dan mengimplementasikan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kapasitas kelembagaan dalam kegiatan PLPBK. Kajian didalamnya bersifat deskriptif kapasitas kelembagaan dalam kegiatan PLPBK diuraikan secara deskriptif. Penelitian ini mengkomparasikan dua BKM, yaitu BKM Sejahtera Mandiri Kabupaten Kendal dan BKM Podosugih Kota Pekalongan.

Wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal dan Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan. setelah dilakukan *purposive sampling* terhadap 157 desa/ kabupaten yang menjalankan kegiatan PLPBK di Provinsi Jawa Tengah dengan beberapa pertimbangan seperti kegiatan PLPBK di wilayahnya telah sukses dijalankan, kedekatan dengan Kota Semarang, keterbatasan waktu, sumberdaya, dan dana.



Sumber: Analisis Penyusun, 2013

GAMBAR 1
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
BERBASIS MASYARAKAT DI JAWA TENGAH

KAJIAN LITERATUR

Kelembagaan

Kelembagaan (*institutional*) terdiri dari dua aspek, yakni aspek kelembagaan yang berisi nilai, visi, misi, tujuan, sistem serta aspek organisasai yang berisi peran, fungsi, struktur Boffin (2002) dalam Bossert dan Mitchel (2010). Dalam kegiatan pelembagaan yang berupa penambahan hal-hal baru yang bernilai baik di masyarakat dengan memperhatikan kedua aspek tersebut. Hal ini bermanfaat untuk perubahan masyarakat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas merupakan kemampuan individu dan organisasi atau bagian dari organisasi untuk menampilkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna mencapai tujuan organisasi Glickman dan Servon (1998) dalam Bossert dan Mitchel (2010:40). Linneall (2003) dalam Kapucu et.al (2011) menyebutkan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif. Kapasitas kelembagaan dapat menjadi hal penting dalam suatu lembaga swadaya untuk menjalankan kegiatannya secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Karakteristik Kapasitas Kelembagaan

Karakteristik kelembagaan dilihat dari level-level kapasitas masyarakatnya Liou

(2004), UNDP (1998) dalam Merino dan Carmenando (2012:964):

1. Aspek Individu
Karakteristik kelembagaan dapat terlihat dari kapasitas individu sebagai anggota dari suatu organisasi tersebut.
2. Aspek Kelompok
Kelompok merupakan unit komunitas yang merupakan proses menjadi atau proses membentuk lembaga dengan adanya kepentingan bersama (Webber (1964) dalam Floriin (1990:45).
3. Aspek Kelembagaan
Kapasitas dari kelembagaan berupa sifat kepemimpinan, adanya sistem, dan kerjasama dengan pihak/stakeholder lain.

Kemiskinan

Pengertian kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah suatu kondisi dimana seorang atau sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar tersebut antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal tersebut sependapat dengan BPS (2010) yang mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Konsep kemiskinan diungkapkan Seebom Rowntree (1901) dalam Gustafsson (1995:363) kemiskinan merupakan jumlah pendapatan masyarakat yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum (pangan, sandang, papan).



Sumber: Kajian Literatur, 2013

GAMBAR 2
KARAKTERISTIK KAPASITAS KELEMBAGAAN

Kegiatan PLPBK

PLPBK yaitu Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas yang pada dasarnya adalah program lanjutan dari P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dibawah naungan Departemen Pekerjaan Umum sejak tahun 1999, yang sekarang disebut PNPM Mandiri Perkotaan (www.ciptakarya.pu.go.id). Program PNPM Mandiri Perkotaan ini diimplementasikan oleh Dirjen Cipta Karya DPU sejak tahun 2007 dimana dalam pelaksanaannya program ini dibagi menjadi tiga tahapan pelaksanaan, yaitu

1. pendampingan masyarakat tidak berdaya menuju masyarakat berdaya (dilakukan melalui intervensi perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal)

2. pendampingan dari masyarakat berdaya menjadi masyarakat mandiri (pembelajaran kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok peduli setempat dalam kegiatan *channeling program*)
3. tahap pendampingan dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani (penguatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan kualitas permukiman yang berkelanjutan).

Saat ini program PNPM Mandiri Perkotaan telah memasuki tahapan ketiga yaitu mewujudkan masyarakat yang madani dengan program andalan yang dikeluarkan adalah program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas).

Program PLPBK merupakan intervensi lanjutan dari program PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang merupakan salah satu dari kebijakan

pada masa pemerintahan SBY-Boediono. Untuk mencapai tujuan PLPBK, dilakukan beberapa strategi pelaksanaan, seperti menggunakan pembangunan lingkungan untuk membangun masyarakat adil, maju, dan sejahtera melalui edukasi masyarakat, serangkaian musyawarah warga, penguatan BKM/BKM dan UP-UP sebagai pusat pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.

Program PLPBK ini pelaksanaannya dilakukan secara terpadu pada tingkat kawasan/lingkungan permukiman melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dengan memperhatikan tatanan sosial kemasyarakatan serta penataan prasarana lingkungan dan kualitas hunian. Pengembangan kegiatan ini disebut sebagai pendekatan TRIDAYA (yaitu keterpaduan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disebut sebagai pembangunan SEL) yang sebenarnya merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mencapai pembangunan permukiman yang berkelanjutan ditempuh tiga jalur, yaitu orientasi pada perubahan perilaku (*attitude*), orientasi pada Pengelolaan oleh masyarakat *sendiri* (*self community management*), dan orientasi pada inovasi dan kreativitas masyarakat (*entrepreneurship*).

Untuk mencapai tujuan PLPBK, dilakukan beberapa strategi pelaksanaan, seperti menggunakan pembangunan lingkungan untuk membangun masyarakat adil, maju, dan sejahtera melalui edukasi masyarakat, serangkaian musyawarah warga, penguatan BKM/BKM dan UP-UP sebagai pusat pelayanan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Selain itu menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat (*entrepreneurship*) melalui mengorganisasi masyarakat untuk menyusun dan menyepakati rencana pembangunan serta reorientasi Peran Pemerintah dan Swasta

menuju tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dimana adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian serta pengolahan data melalui deskriptif. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan wilayah studi menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa pertimbangan, seperti waktu studi yang terbatas, kedekatan dengan Kota Semarang, dana yang terbatas, dan lain-lain. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota BKM dari dua wilayah penelitian, yakni BKM Sejahtera Mandiri Kelurahan Kebondalem Kendal dan BKM Podosugih Kelurahan Podosugih Pekalongan. Anggota tiap-tiap BKM sebanyak 15 orang, dengan demikian responden yang digunakan dari dua BKM sebanyak 30 orang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis skoring. Analisis skoring atau pembobotan digunakan untuk menilai kriteria atau penilaian tertentu dengan menggunakan skala terukur. Berdasarkan pembobotan, maka didapat jumlah skor tertinggi dan terendah untuk masing-masing BKM adalah sebagai berikut:

Total skor tertinggi: $4 \times 15 \times 19 = 1140$

Total skor terendah: $1 \times 15 \times 19 = 285$

Keterangan:

4: bobot tertinggi untuk setiap variabel

1: bobot terendah untuk setiap variabel

15: jumlah responden untuk setiap BKM

19: jumlah pertanyaan dalam kuisioner yang menerangkan variabel

Menurut (Struges dalam Nazir, 2005) terdapat aturan mengenai penentuan banyak kelas, yaitu sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,322 \log n$$

Keterangan:

K : banyaknya kelas

n : jumlah variabel

Selain menghitung banyaknya kelas, diperlukan menghitung rentang (*range*) dan interval kelas dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan:

I : interval kelas

R : rentang (*range*)

K : banyaknya kelas

Dari rumus perhitungan rentang, banyak kelas, dan interval kelas, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

R : 1140 – 285 = 855

K : $1 + 3,3 \log 9 = 4,149 = 4$

I : $855 / 4 = 213,75$

TABEL I
KELAS HASIL SKORING

Kelas	Keterangan	Skor
I	Kapasitas BKM sangat baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	926,28 - 1140
II	Kapasitas BKM baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	712,52 – 926,27
III	Kapasitas BKM kurang baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	498,76 – 712,51
IV	Kapasitas BKM tidak baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK	285 – 498,75

Sumber: Analisis Penyusun, 2013

Keterangan:

- **Kapasitas BKM sangat baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK:** BKM dapat melaksanakan kegiatan PLP-BK sangat baik karena dinilai sangat mampu

menjalankannya dilihat dari aspek individu, kelompok, dan lembaga.

- **Kapasitas BKM baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK:** BKM dapat melaksanakan kegiatan PLP-BK cukup baik karena memiliki kemampuan dalam menjalankannya dilihat dari aspek individu, kelompok, dan lembaga.
- **Kapasitas BKM kurang baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK:** BKM dalam melaksanakan kegiatan PLP-BK dinilai kurang baik karena kurang memiliki kemampuan dalam menjalankannya dilihat dari aspek individu, kelompok, dan lembaga.
- **Kapasitas BKM tidak baik dalam menjalankan kegiatan PLP-BK:** BKM dalam melaksanakan kegiatan PLP-BK dinilai tidak baik karena belum memiliki kemampuan dalam menjalankannya serta memiliki kendala dilihat dari aspek individu, kelompok, dan lembaga.

HASIL PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan adalah analisis kapasitas kelembagaan dalam kegiatan PLPBK. Dalam melihat kapasitas kelembagaan lokal secara internal, dilihat dari tiga indikator yakni aspek individu, kelompok, dan lembaga. Kemudian dilakukannya komparasi terhadap dua BKM, antara lain BKM Sejahtera Mandiri Kabupaten Kendal dan BKM Podosugih Kota Pekalongan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL II
PERHITUNGAN SKORING
KAPASITAS KELEMBAGAAN

No	Nama BKM	Total Skor	Kelas
1.	BKM Podosugih, Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan	945	I
2.	BKM Sejahtera Mandiri, Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal	897	II

Sumber: Analisis Penyusun, 2013

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui kelas masing-masing BKM dalam kegiatan PLPBK. BKM Podosugih dengan total skor 945 masuk ke dalam kelas I, sedangkan BKM Sejahtera Mandiri dengan total skor 897 masuk ke dalam kelas II. Hasil kuesioner ke 30 responden yakni 15 anggota BKM Podosugih dan 15 anggota BKM Sejahtera Mandiri menunjukkan BKM Podosugih memiliki kemampuan yang lebih baik dalam kegiatan PLPBK berupa perencanaan, pemasaran, dan pelaksanaan pembangunan dibandingkan BKM Sejahtera Mandiri. Kemampuan BKM dalam kegiatan PLPBK dilihat dari 9 variabel dan 12 indikator variabel dalam penilaian. Antara kedua BKM tersebut memiliki total skor yang tidak jauh berbeda sehingga kelas yang terbentuk tidak jauh berbeda.

TABEL III
KLASIFIKASI KAPASITAS KELEMBAGAAN

Kelas	Skor	Keterangan	Nama BKM
I	926,28 - 1140	Kapasitas BKM sangat baik dalam menjalankan kegiatan PLPBK	BKM Podosugih, Kelurahan Podosugih Kota Pekalongan
II	712,52 - 926,27	Kapasitas BKM baik dalam menjalankan kegiatan PLPBK	BKM Sejahtera Mandiri, Kelurahan Kebondalem Kabupaten Kendal

Sumber: Analisis Penyusun, 2013

Hasil analisis di atas dapat dilihat klasifikasi kapasitas kelembagaan lokal dalam kegiatan PLPBK pada BKM Podosugih dan BKM Sejahtera Mandiri. Secara umum, kedua BKM tersebut memiliki kapasitas BKM yang cukup baik sebab berada pada kelas I dan II. Hal ini berarti baik BKM Podosugih maupun BKM Sejahtera mandiri mampu menjalankan kegiatan PLPBK secara baik dilihat dari aspek individu, kelompok, dan lembaga. Kedua BKM tersebut dari tiap-tiap anggotanya sudah saling mengenal antar anggota, saling berbagi, intensitas interaksi sosial, komitmen, kedekatan antar anggota, partisipasi, pengaruh dalam kelompok, pemenuhan

kebutuhan bersama, interaksi antar anggota, kepemimpinan, kerjasama dengan pihak lain, dan pencapaian tujuan sudah cukup baik. Akan tetapi keduanya memiliki kualitas yang berbeda-beda.

BKM Podosugih berada pada kelas I dengan rentang skor 926,28-1140. Kelas I disini yang berarti kapasitas BKM sangat baik dalam menjalankan kegiatan PLPBK. Hal ini disebabkan BKM Podosugih dinilai sangat mampu baik dalam kegiatan perencanaan, pemasaran, dan pelaksanaan pembangunan yang kemudian ditinjau dari aspek individu, kelompok, dan lembaga. Sedangkan BKM Sejahtera Mandiri berada pada kelas II dengan rentang skor 712,52-926,27. Kelas II disini yang berarti kapasitas BKM cukup baik dalam menjalankan kegiatan PLPBK. Hal ini disebabkan BKM Sejahtera Mandiri dinilai cukup mampu dalam kegiatan perencanaan, pemasaran, maupun pelaksanaan pembangunan yang ditinjau dari aspek individu, kelompok, dan lembaga.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Dilihat dari rumusan permasalahan berupa kinerja kelembagaan yakni BKM Sejahtera Mandiri di Kabupaten Kendal dan BKM Podosugih di Kota Pekalongan yang bervariasi, pemanfaatan dana BLM yang masing-masing BKM memiliki kapasitas dalam penyerapan dana yang berbeda-beda, kinerja dalam implementasi terhadap permasalahan penataan lingkungan, tidak semua BKM telah siap dan memiliki kemampuan dalam perwujudan visi program PLPBK secara efektif untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, serta merencanakan dan mengimplementasikan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil capaian penelitian kedua yang didapat berdasarkan sasaran penelitian yakni menganalisis kapasitas kelembagaan pada aspek individu,

kelompok, dan lembaga. Terdapat empat kesimpulan yakni:

- Kapasitas kelembagaan BKM Sejahtera Mandiri Kabupaten Kendal dan BKM Podosugih Kota Pekalongan
Berdasarkan hasil skoring pada aspek individu, kelompok, dan lembaga membuktikan bahwa kapasitas BKM Podosugih sangat baik dalam menjalankan kegiatan PLPBK dengan total skor 945. Disisi lain, dengan 897 BKM Sejahtera Mandiri memiliki kapasitas baik dalam menjalankan kegiatan PLPBK.
- Kapasitas kelembagaan dilihat dari aspek individu
Hasil analisis skoring membuktikan kapasitas kelembagaan pada aspek individu pada BKM Sejahtera Mandiri lebih baik dibandingkan BKM Podosugih. Kerelaan waktu luang yang tumbuh dalam individu masing-masing yakni anggota BKM Sejahtera Mandiri lebih besar dibandingkan BKM Podosugih.
- Kapasitas kelembagaan dilihat dari aspek kelompok
Hasil analisis skoring membuktikan kapasitas kelembagaan pada BKM Podosugih pada aspek kelompok lebih baik dibandingkan BKM Sejahtera Mandiri. Rasa kebersamaan didalam kelompok untuk keanggotaan, kepedulian satu sama lain, saling ketergantungan, dan hubungan emosional yang muncul pada BKM Podosugih lebih besar dibandingkan BKM Sejahtera Mandiri.
- Kapasitas kelembagaan dilihat dari aspek lembaga
Hasil analisis skoring membuktikan kapasitas kelembagaan BKM Podosugih pada aspek lembaga lebih baik dibandingkan Kemampuan lembaga sebagai sesuatu yang mawadahi masyarakatnya dalam sifat kepemimpinan koordinator, kerjasama dengan stakeholders lain,

dan pencapaian tujuan untuk di BKM Podosugih lebih baik dengan hasil yang lebih nyata dibandingkan BKM Sejahtera Mandiri.

2. *Research question* terjawab dari hasil analisis kapasitas kelembagaan pada aspek individu, kelompok, dan lembaga dalam kegiatan PLPBK. Artinya secara ilmiah telah dapat dibuktikan bahwa kapasitas antara BKM Sejahtera Mandiri dan BKM Podosugih berbeda-beda dalam upaya penataan kawasan lingkungan.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh peneliti, maka diajukan beberapa rekomendasi bagi pemerintah dan kelembagaan lokal BKM serta masyarakat berkaitan dengan kapasitas kelembagaan lokal dalam keefektifan kegiatan PLPBK.

1. Rekomendasi untuk pemerintah
Pemerintah kota/ kabupaten serta pusat hendaknya melakukan evaluasi rutin dan berkala dalam peningkatan peningkatan kinerja kegiatan program PLPBK sebagai upaya perbaikan program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan lokal (BKM) sebagai upaya dalam perwujudan visi program PLPBK secara efektif untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Rekomendasi untuk BKM dan Masyarakat
 - Masyarakat hendaknya belajar secara bersama-sama untuk dapat mampu menata lingkungan secara efektif
 - BKM hendaknya mampu meningkatkan kapasitasnya dalam merencanakan dan mengembangkan wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program PLPBK
 - BKM bersama masyarakat hendaknya lebih dapat meningkatkan kepercayaan, kerelaan, kepedulian,

komitmen di dalam kelompok itu sendiri dalam setiap kegiatan

- Masyarakat hendaknya dapat menumbuhkembangkan sikap inisiatif dan kesadaran untuk berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan

Selain itu, untuk rekomendasi penelitian lanjutan berupa faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas kelembagaan lokal terhadap efektivitas penataan kawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XV, 2 Juli 2012
- Bourguignon, François dan Satya R. Chakravarty. 2003. "The measurement of multidimensional poverty." *Journal of Economic Inequality*, Vol. 1, pp. 25-49
- Bossert dan Mitchel. 2010. "Health sector decentralization and local decision-making: Decision space, institutional capacities and accountability in Pakistan" dalam *Jurnal Social Science and Medicine*
- BPS. 2010. *Data dan Informasi Kemiskinan Jawa Tengah 2002-2010*. Kantor Statistik Provinsi Jawa Tengah
- BPS. 2012. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Februari 2012*. Jakarta.
- Florin, Paul dan Abraham Wandersman. 1990. "An Introduction to Citizen Participation, Voluntary Organizations, and Community Development: Insights for Empowerment Through Research." *American Journal of Community Psychology*, Vol. 18 No.1, pp. 41-54
- Gustafsson, Bjorn. 1995. "Assessing poverty Some reflections on the literature." *Population Economics*, Vol. 8.4, pp. 361-381
- Hughey, Joseph et al. 1999. "Sense of Community in Community Organizations: Structure and Evidence of Validity" dalam *Journal of Community Psychology*. Vol. 27 No. 1, pp. 97-113
- Kapucu, et al. 2011. "Survival of the fittest: Capacity Building for Small Nonprofit Organization". *Evaluation and Program Planning*, Vol. 34, pp. 236-245
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik. 2011. *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*
- Merino, Susana Sastre dan Ignacio de los Ríos Carmenado. 2012. "Capacity Building in Development Project" dalam *Procedia: Social and Behavioral Sciences*. Vol. 46, pp. 960-967
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Perpres No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Sakip, Siti Rasidah Md et al. 2012. "Sense of Community in Gated and Non-Gated Residential Neighborhoods" dalam *Procedia: Social and Behavioural Science*. Vol. 50, pp. 818-826
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- www.ciptakarya.pu.go.id. (Website Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum). Diakses pada 20 November 2012